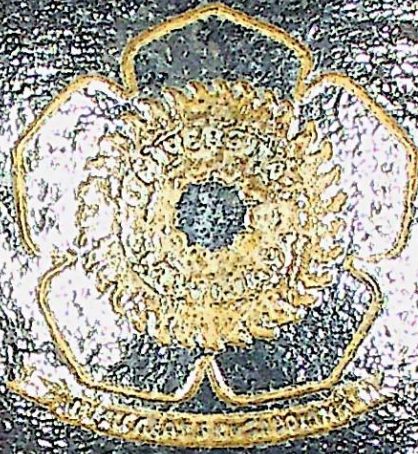


Disusun dan Dirancang
Gedung DPRD Kota Padang

Disusun untuk memenuhi persyaratan
penelitian sarjana strata I (S1) Teknik Arsitektur



Disusun oleh :

SITI AMINAH

NIM.03061006033

Program Studi Teknik Arsitektur

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Andalas

S
725.107
Siti
P
2014

27287 / 27087

**Perencanaan dan Perancangan
GEDUNG DPRD KOTA PADANG**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
pendidikan sarjana strata 1 (S1) Teknik Arsitektur**



Disusun oleh :

SITI AMINAH

NIM.03061006033

**Program Study teknik Arsitektur
Jurusan teknik Sipil Fakultas teknik
Universitas Sriwijaya**

2012

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan Judul

**PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
GEDUNG DPRD KOTA PADANG**

Diajukan untuk Memenuhi

Persyaratan Pendidikan Sarjana Strata satu (S1) Teknik Arsitektur

Oleh

Siti Aminah

03061006033

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Ir.Hj. Meiverina Hanum, MT

NIP. 195705141989032001

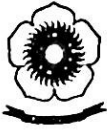
Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Arsitektur

Universitas Sriwijaya

Wienty Triyuly, ST, MT

NIP. 19770528200122002



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul "*Perencanaan dan Perancangan Kantor DPRD Kota Padang*", sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Teknik Arsitektur Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

Selama proses pengerjaan laporan tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan ide, untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga yang selalu memberi do'a dan semangat serta motivasinya, terutama buat mamaku yang luar biasa, papa, nenekku, ibu, abang, ayuk, kak ari, acik, bunda ika dan semuanya.
2. Ibu Ir. Hj. Meiverina Hanum, MT selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir,, Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun selama penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Zulherman selaku ketua DPRD kota Padang yang telah banyak membantu, terima kasih atas wawancara dan datanya ya Pak. Tetap jadi wakil rakyat yang ramah dan berpihak kepada rakyat.
4. Buat teman penjuang jalur gaza alias anak TA studio 25, yang udah rela senasib sepenanggungan. Akhirnya kita kelar juga.
5. Buat teman-teman (Yayan, Lutfi, Ogin, Nuning, dll) dan adik tingkat (Dini, Ii, Fiki, Adel, Fira, Lia, dll) yang telah banyak membantu. Terimakasih ya....
6. Genk Undur-undur (Odhie, Chotimah, Reny, Rizka, Anis, Rizky, Mimi, Ajeng, Rika).
7. Seluruh staf pengajar dan tata usaha di Program Studi Teknik Arsitektur,,
8. All Laskar Chitek 2006.... Semangat untuk kita semua.. ☺



9. Dan semua yang telah membantu serta memberikan doa dan semangat...
terimakasih semuanya...

Semoga laporan yang penulis buat dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan berharap apa yang telah dilakukan ini mendapat ridhoNya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, Juli 2010

Penulis,

Siti Aminah



DAFTAR ISI

UNIVERSITAS ANDALAS
NO. DAFTAR
143017
TANGGAL
11 SEP 2014

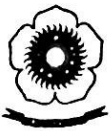
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Ruang Lingkup Penulisan	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
1.6. Kerangka Berpikir	7
BAB II DASAR-DASAR DAN METODOLOGI	8
2.1. Dasar-dasar Perancangan dan Azas Perancangan	8
2.2.1. `dasar perancangan.....	8
2.2.2. `Arsitektur Regionalisme	10
2.2.3. Prinsip Bangunan Tahan Gempa	11
2.2. Metode Pelaksanaan Perancangan	13
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN	
PENDEKATAN PERANCANGAN	18
3.1. Studi Literatur.....	18
3.1.1. definisi gedung DPRD kota Padang.....	18
3.1.2. Bangunan Negara.....	20
3.1.2.1. persyaratan bangunan negara.....	22
3.1.3. Kantor.....	27
3.2.4. Tinjauan DPRD	35
3.2. Demokrasi	44
3.2.1. Pengertian Demokrasi	44
3.2.2. Prinsip-prinsip Demokrasi	44
3.2.3. Azas-azas Demokrasi	44
3.2.4. Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi	45
3.3. Sistem keselarasan Minangkabau	46
3.2.1. falsafat dan konsep hidup Minangkabau.....	48
3.2.2. Arsitektur Minangkabau	53



3.4. Arsitektur Regionalisme.....	57
3.5. Teknis Bangunan Tahan Gempa	60
3.6. Tinjauan DPRD Kota Padang	52
3.7. Studi Objek Scjcnis	67
3.4.1. Kantor DPRD Kota Surabaya	67
3.4.1. Kantor DPRD Kota Palembang	69
3.8. Tinjauan Umum Kota Padang	71
3.8.1. letak geografis	71
3.8.2. peta Administrasi	72
3.6.3. topografi dan kelerengan	72
3.6.9. Perangkat Pemerintah Daerah Kota Padang	73
3.6.9. Kedudukan Kota Padang dalam Peta Rawan Gempa	74
3.8. Tinjauan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Padang.....	76
BAB IV ANALISA	79
4.1. Analisa Fungsional	79
4.1.1. Analisa Alur Kegiatan, Aktivitas, pelaku dan keb.ruang	80
4.1.2. Analisa waktu kegiatan	96
4.1.3. Analisa sifat ruang	97
4.1.4. Analisa karakter dan penataan ruang	105
4.1.5. Analisa kebutuhan perabot	106
4.1.6. Analisa organisasi ruang	109
4.1.7. Analisa luasan ruang	112
4.1.8. Analisa tata ruang dalam	122
4.1.8. Analisa penzoningan ruang	125
4.2. Analisa Tapak.....	127
4.2.1. Analisa Existing tapak, peraturan regulasi tapak	128
4.2.2. Analisa Klimatologi Tapak	132
4.2.3. Analisa Kebisingan Tapak	135
4.2.4. Analisa View dan Orientasi Tapak	136
4.2.5. Analisa Ruang luar	139
4.2.6. Analisa Pencapaian Tapak	142
4.2.6. Analisa Sirkulasi	145
4.2.6. Analisa Area Parkir Kendaraan.....	148
4.3. Analisa Bangunan	150
4.3.1. Analisa Tampilan Bangunan	150
4.3.2. Analisa Arsitektural	151
4.3.3. Analisa Karakteristik Bangunan	152
4.3.4. Analisa Pengolahan Massa Bangunan	152



4.3.5. Analisa Bentuk Dasar Bangunan	153
4.3.6. Analisa Gubahan Massa	155
4.3.7. Analisa sirkulasi bangunan	155
4.4. Analisa Struktur	156
4.4.1. Struktur jenis struktur	156
4.4.2. Struktur pondasi	161
4.4.3. Struktur kolom dan balok.....	162
4.4.4. Struktur atap.....	166
4.5. Analisa Utilitas	168
4.5.1. Sistem Distribusi Plumbing	168
4.5.2. Sistem Distribusi Listrik	172
4.5.3. Sistem Pencahayaan	173
4.5.4 Sistem Penghawaan	174
4.5.5. Sistem Proteksi Kebakaran	175
4.5.6. Sistem Penangkal Petir.....	177
4.5.7. Sistem Transportasi Vertikal dalam Bangunan	178
BAB V KONSEP PERANCANGAN	181
5.1. Konsep Dasar Perancangan.....	181
5.2. Konsep Tematik	182
5.3. Konsep Perancangan Programatik	183
5.3.1. Penataan ruang	183
5.3.2. konsep penzoningan ruang	185
5.3.3. konsep sirkulasi dan hubungan ruang	191
5.3.4. konsep tata ruang	194
5.3.5. konsep luasan ruang	196
5.5. Konsep Perancangan Bangunan.....	196
5.5.1. Konsep Bentuk Dasar Bangunan	196
5.5.2. Konsep Gubahan Massa.....	197
5.5.3. Konsep Tampilan Bangunan	198
5.4. Konsep Tapak.....	200
5.4.1. Konsep penzoningan tapak	201
5.4.2. Konsep pola penataan tapak.....	201
5.4.2. Konsep Klimatologi tapak.....	203
5.4.2. Konsep view dan orientasi tapak.....	204
5.4.3. Konsep pencapaian dan sirkulasi	205
5.4.4. Konsep landscape dan tata hijau	206



5.6. Konsep Perancangan Struktur	207
5.6.1. Konsep Bahan Bangunan	208
5.6.1. Konsep Struktur Bagian Bawah Bangunan	209
5.6.2. Konsep Struktur Bagian Badan Bangunan	209
5.6.3. Konsep Struktur Atap	211
5.7. Konsep Perancangan Utilitas	190
5.7.1. Konsep Utilitas Tapak	190
5.7.2. Konsep Utilitas Gedung	192
5.7.2.1. Konsep Distribusi Air	193
5.7.2.2. Konsep Distribusi Listrik	193
5.7.2.3. Konsep Pencahayaan	194
5.7.2.4. Sistem Proteksi Kebakaran	195
5.7.2.5. Konsep Penghawaan	196
5.7.2.6. Sistem Penangkal petir.....	217
5.7.2.7. Sistem Transportasi vertikal.....	218
DAFTAR PUSTAKA	219
LAMPIRAN	220



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Musyawarah dalam mencapai mufakat sangat mengutamakan keterbukaan dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah kompleks di Indonesia di berbagai aspek kehidupan sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Yang berlandaskan pada Pancasila, sila keempat yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Kegiatan musyawarah tersebut dirangkum dalam suatu lembaga legislatif yang bernama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Anggota DPR merupakan wakil-wakil rakyat dari berbagai propinsi/ daerah yang ada di Indonesia, yang bertugas untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada daerahnya masing-masing ke lembaga legislatif. Sebagai perwujudan dalam menjalankan pemerintahan daerah, maka dibentuk sekelompok orang yang mewakili masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi dari daerah ke pemerintah pusat (DPR) yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai wakil yang ditunjuk oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat, anggota DPRD haruslah berlandaskan kepada azas demokrasi dan dan keterbukaan.

Minangkabau merupakan salah satu suku yang sangat menonjol dan berpengaruh di Indonesia. Dalam sistem pemerintahannya Minangkabau menganut paham demokrasi, egaliter dan sintetik. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri demokrasi dalam pemerintahannya seperti yang tertuang dalam ungkapan “*putuih rundiangan dek sakato, rancak rundiangan disapakati , kato surang dibulek-i, kato basamo kato*



mufakat” . Untuk memutuskan sesuatu hal yang menyangkut aspek kehidupan bersama diadakanlah musyawarah mufakat yang di wakili oleh masing-masih suku kekerabatan yang disebut “panghulu”.

Konsep kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu “ adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Yang artinya adat yang berlaku di Minangkabau sesuai dengan syariat agama Islam. Konsep ini memberikan pelajaran baik dalam kehidupan masyarakat minang yaitu : mengutamakan prinsip hidup seimbang, kesadaran kepada luasnya bumi Allah, mencari nafkah dengan usaha sendiri (memiliki jati diri), tawakal bekerja dan tidak boros, kesadaran kepada ruang dan waktu, pandai mengendalikan diri sendiri. Konsep hidup ini jugalah yang seharusnya ada pada diri masing-masing wakil rakyat Minangkabau atau yang disebut anggota DPRD.

Padang adalah ibukota dari Provinsi Sumatera Barat yang yang termasuk dalam wilayah kerapatan Minangkabau. Yang penduduknya merupakan keturunan suku Minangkabau yang adat istiadatnya berlandaskan kepada agama Islam. Hendaknya penerapan adat istiadat ini sudah dilaksanakan oleh setiap keturunan Minang agar hidup dapat tertata dengan baik dan sesuai dengan syariat agama, tak terkecuali kepada anggota DPRD kota Padang. Sebagai wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat haruslah memiliki jiwa kepemimpinan, jujur, dan dapat dipercaya.

DPRD berfungsi untuk menyampaikan Untuk dapat menjalankan semua tugas DPRD, diperlukan sebuah wadah fisik yang dapat menampung semua kegiatan dan fungsi dari anggota dewan yang memadai sesuai kedudukannya sebagai lembaga pemerintah tingkat daerah.

Pasca gempabumi yang melanda Kota Padang dan sekitarnya pada 30 September 2009 yang lalu, menyebabkan kota Padang porak poranda dan mengalami kerugian yang sangat besar baik segi korban jiwa maupun materi. Banyak sarana dan prasarana pemerintah kota yang rusak parah bahkan roboh sehingga tidak layak dipergunakan lagi, antara lain yaitu kantor Balai Kota padang, Kontor DPRD kota Padang, Kantor BAPEDA dan beberapa gedung pemerintah lainnya. Sementara ini pusat pemerintahan



Kota Padang di pindahkan sementara ke bekas terminal Aia Pacah, Padang Timur. Tentu saja kantor sementara ini dirasa tidak layak dan sangat tidak nyaman untuk digunakan sebagai pusat pemerintahan Kota Padang. Sedangkan untuk anggota DPRD kota Padang masih menggunakan gedung lama. Gedung DPRD kota Padang dirasa sudah tidak layak lagi dan sudah tidak nyaman untuk digunakan. Karenanya di perlukan gedung kantor DPRD yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, namun tetap fungsional serta dapat menunjukkan identitas Minangkabau. Ditambah lagi dengan keluarnya surat dari Kementerian Kesehatan RI, sehubungan dengan perluasan RS M. Jamil, tentang tukar guling gedung dan lahan DPRD kota Padang, maka DPRD membutuhkan gedung baru untuk menampung kegiatan dan aktifitas anggota Dewan.

Saat ini pemerintah kota Padang telah merencanakan membangun pusat pemerintahan kota Padang, ke kawasan Aia Pacah, Kec. Nanggalo. Pembangunan Pusat Pemerintahan ini dilakukan secara bertahap dan rencana gedung yang akan di bangun pada kawasan ini adalah Kantor Balai Kota, Kantor DPRD Kota Padang, dan Masjid Raya Pemkot Padang. Ketiga gedung ini direncanakan di bangun di atas lahan seluas 9 H dengan membangun kantor Balai Kota terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kantor DPRD baru terakhir Masjid Raya Pemda Padang.

Gedung DPRD yang baru diharapkan dapat menjadi ikon baru untuk wajah kota Padang, yang dapat mewakili identitas kota dan jati diri suku Minangkabau. Mengingat Padang adalah kota yang rawan akan terjadinya gempa bumi, maka diperlukan sebuah bangunan dengan struktur yang ramah terhadap gempabumi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai rencana pembangunan gedung DPRD Kota Padang, maka yang menjadi perumusan masalah adalah:

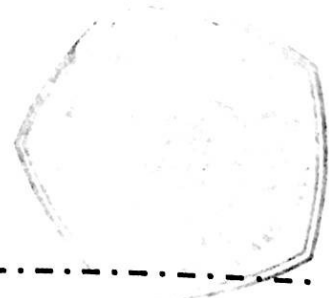


-
- Bagaimana mewujudkan perancangan gedung DPRD Kota Padang sebagai fasilitas untuk menunjang kinerja anggota dewan dengan mengabstraksikan azas keterbukaan dan transparansi.
 - Bagaimana mewujudkan perancangan gedung DPRD kota Padang sebagai wadah fisik yang dapat mewakili identitas kota Padang dengan menerapkan arsitektur regionalisme dan memasukan filosofi konsep kehidupan masyarakat Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” pada desain.
 - Bagaimana mewujudkan perancangan gedung DPRD yang responsif terhadap kondisi lingkungan kota Padang yang kerap dilanda bencana gempabumi, dengan menerapkan struktur bangunan tahan gempa pada rancangan gedung.

1.3. Maksud dan tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah menyusun dan mendapatkan konsep perancangan Gedung DPRD Kota Padang dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Gedung DPRD sebagai wadah fisik dan fasilitas bagi aktivitas anggota dewan secara terpadu yang fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.
2. Bangunan gedung DPRD yang mampu mewakili citra pemerintahan yang terbuka dan mengabstraksikan konsep dasar kehidupan masyarakat Minangkabau serta tetap mempertahankan identitas arsitektur lokal kota Padang.
3. Struktur bangunan DPRD yang responsif terhadap gempabumi, sehingga bangunan ini aman dari kerusakan serta aman bagi pengguna bangunan.





1.4. Ruang lingkup pembahasan

Pembahasan dititikberatkan pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur, antara lain :

- ✚ Aspek fungsional yang menekankan pada kebutuhan ruang dan fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- ✚ Aspek Arsitektural yaitu konsep perencanaan gedung DPRD Kota Padang dengan menerapkan desain Arsitektur Regionalisme, yaitu penggunaan arsitektur lokal berupa rumah Gadang yang kemudian diadaptasikan dengan penggunaan arsitektur Modern. Serta penerapan filosofi kehidupan minangkabau yang seimbang, dan konsep demorasi DPRD.
- ✚ Aspek pemilihan lokasi perencanaan gedung DPRD kota Padang, direncanakan pada kawasan pengembangan pusat perkantoran pemerintahan Kota Padang yaitu di kawasan Aia Pacah, kecamatan Nanggalo.

1.5. Sistematika penulisan

Proposal ini akan membahas beberapa hal yang disusun dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan data-data atau landasan teori yang menunjang tentang perencanaan dan perancangan gedung DPRD kota Padang dikawasan Aia Pacah, Kec. Nanggalo



Berisi tinjauan tentang gedung DPRD yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang memuat tentang pengertian, fungsi, dan perkembangan Kantor DPRD dan arsitektur Regionalisme.

BAB III METODOLOGI PENULISAN

Menguraikan mengenai metodologi penulisan yang digunakan, antara lain berisi teknik pengumpulan data, baik primer maupun sekunder sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan skripsi.

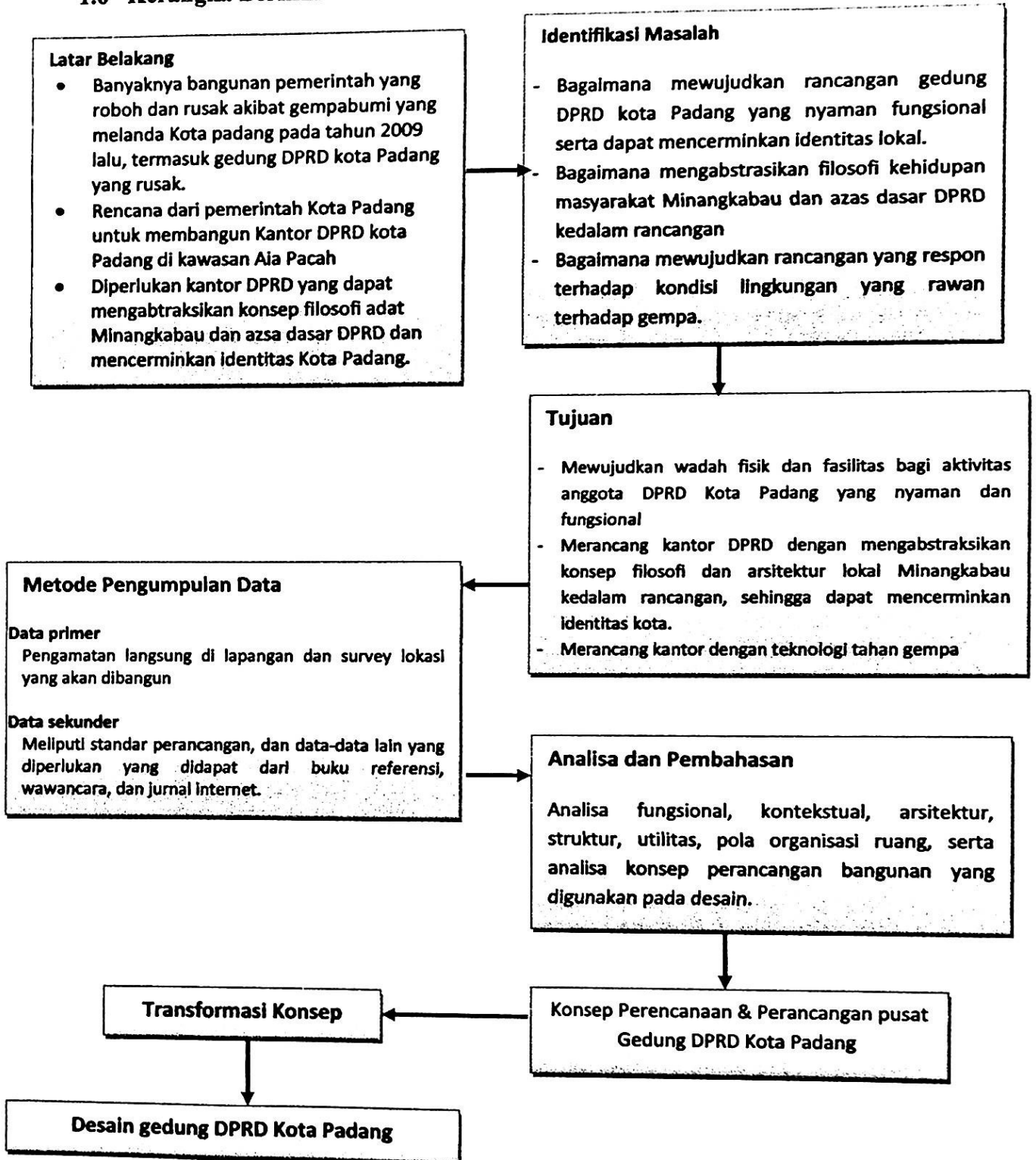
Berisi tinjauan tentang gedung DPRD yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang memuat tentang pengertian, fungsi, dan perkembangan gedung DPRD dan arsitektur Regionalisme. Dan berisi tentang studi Objek bangunan serupa.

BAB IV KELUARAN

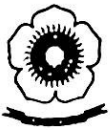
Penjelasan hasil akhir dari hasil keseluruhan tugas akhir yang dilalui.



1.6 Kerangka Berfikir



Bagan 1.1. kerangka berfikir



BAB II

DASAR DASAR DAN METODOLOGI

2.1. Dasar-dasar dan Azas-azas Perancangan

2.1.1. Dasar-dasar Perencanaan dan Perancangan Gedung DPRD Kota Padang

Gedung DPRD Kota Padang merupakan fasilitas pemerintahan yang berskala Kota, yang berfungsi sebagai wadah dalam penyampaian aspirasi masyarakat Kota Padang dan sebagai tempat untuk mewadahi aktivitas dewan perwakilan daerah serta kesekretariatannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diperlukan dasar pada perencanaan dan perancangan. Adapun kriteria dasar kantor DPRD antara lain :

1. Bangunan Gedung Negara

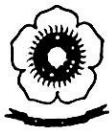
Kantor DPRD merupakan salah satu bangunan Gedung Negara, sehingga dalam perencanaan harus sesuai dengan prinsip, maksud, tujuan dan ruang lingkup pedoman teknis pembangunan gedung Negara, dengan mengikuti persyaratan dan spesifikasi teknis, serta standar luasan berdasarkan Undang-undang Bangunan Gedung dan Peraturan pemerintahan yang telah ditetapkan.

2. Demokrasi

Sebagai wadah dalam penyampaian aspirasi masyarakat, kantor DPRD harus dapat mengabstraksikan azas demokrasi pada perancangan gedung DPRD. Demokrasi berarti adanya persamaan hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Demokrasi dapat diwujudkan dalam musyawarah mufakat yang di aplikasikan dengan adanya ditunjuk perwakilan rakyat dalam lembaga DPR/DPRD yang transparan dan terbuka.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai fasilitas pemerintahan, kantor DPRD harus benar-benar dapat mewadahi aktivitas dewan perwakilan daerah sesuai dengan tugas



.....

pokok dan fungsi dari anggota dewan itu sendiri, yang sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang.

4. Keamanan / *safety*

Adanya aksi unjuk rasa (demonstrasi) masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkadang tidak selamanya secara baik-baik (musyawarah), kemungkinan dapat juga terjadi tindak anarkis. Maka selain terbuka terhadap masyarakat, perencanaan juga harus mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para anggota dewan perwakilan daerah. Sebagai daerah yang rawan terhadap gempa bumi, gedung DPRD kota Padang juga responsif terhadap hal tersebut, guna mengurangi dampak buruk bencana bagi keselamatan pengguna.

5. Konsep adat “ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”

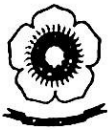
Sebagai keturunan Minangkabau, masyarakat kota Padang konsep dasar adat yang digunakan adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang artinya tingkah laku (adat) yang berlaku berdasarkan pada ajaran agama islam. Hal ini sebagai salah satu unsur regionalisme yang akan dikembangkan.

6. Kriteria – kriteria dasar pendukung

- a) Aksesibilitas
- b) Terpadu
- c) Kenyamanan/ *comfort*
- d) Kemudahan/ sirkulasi pencapaian
- e) Orientasi

Orientasi bangunan akan mempengaruhi bentuk denah, program ruang, serta bentuk bangunan. Orientasi bangunan ditentukan beberapa faktor. antara lain :

- a) View yang menarik
- b) Orientasi cahaya matahari
- c) Beban dan arah angin
- d) Topografi tapak



e) dll.

Kantor DPRD yang akan dirancang menggunakan penerapan desain Arsitektur Regionalisme yang dapat mencerminkan identitas dan citra pemerintahan Padang Untuk itu diperlukan pemahaman atau dasar dalam arsitektur Regionalisme.

2.1.2. Arsitektur Regionalisme

Regionalisme merupakan salah satu aliran arsitektur Neo-modern yang berusaha memadukan arsitektur modern yang dianggap mewakili arsitektur masa kini dan arsitektur tradisional yang dianggap mewakili arsitektur masa lalu dan memunculkan potensi lokal sebagai ciri utama. Aliran ini berusaha melepaskan diri dari gaya universal (*universal style*) dengan memberikan ruang bagi konsep-konsep, bentuk, maupun ornamen arsitektur tradisional.

Arsitektur Tradisional mempunyai lingkup regional sedangkan arsitektur modern mempunyai lingkup universal. Dengan demikian maka yang menjadi ciri utama regionalisme adalah menyatunya Arsitektur Tradisional dan Arsitektur Modern.

Adapun ciri – ciri daripada arsitektur regionalis adalah sebagai berikut :

- Menggunakan bahan bangunan lokal dengan teknologi modern.
- Tanggap dalam mengatasi permasalahan pada kondisi iklim setempat.
- Mengacu pada tradisi, warisan sejarah serta makna ruang dan tempat.
- Mencari makna dan substansi cultural, bukan gaya/ style sebagai produk akhir.

Arsitektur Regionalisme terbagi menjadi dua taksonomi, yaitu *Concrete Regionalism* dan *Abstract Regionalism*. *Concrete Regionalism* meliputi semua pendekatan kepada ekspresi daerah/ regional dengan mencontoh kehebatannya, bagian-bagiannya, atau seluruh bangunan di daerah tersebut. Sedangkan *Abstract Regionalism* menggabungkan unsur-



.....

unsur kualitas abstrak bangunan, misalnya massa, solid dan void, proporsi, sense of space, pencahayaan, dan prinsip-prinsip dalam struktur yang diolah kembali.

Regionalisme dalam arsitektur merupakan suatu gerakan dalam arsitektur yang menganjurkan penampilan bangunan yang merupakan hasil senyawa dari internasionalisme dengan pola cultural dan teknologi modern dengan akar, tata nilai dan nuansa tradisi yang masih dianut oleh masyarakat setempat.

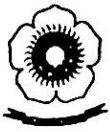
2.1.3. Prinsip Bangunan Tahan Gempa

Dalam buku perencanaan struktur gedung beton bertulang tahan gempa, 2010 yang disusun oleh Imran, dapat diambil prinsip dasar dari bangunan tahan gempa yaitu :

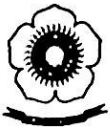
- a. Bentuk denah bangunan yang sederhana, simetris dan tidak terlalu panjang. Apabila tidak memungkinkan bangunan dibuat simetris maka perlu dilakukan pemisahan struktur (diletasi)
- b. Distribusi kekakuan arah vertikal bangunan sedapat mungkin dibuat seragam dan menrus, tanpa locatan.
- c. Massa bangunan dibuat seringan mungkin. Semakin besar massa bangunan semakin besar pula beban inersia yang timbul pada saat terjadi gempa.

Berdasarkan buku pedoman bangunan tahan gempa, 2006 yang disusun oleh Heinz Frick, adapun prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan dari bangunan tahan gempa yaitu :

1. Perencanaan gedung tahan gempa harus sederhana dan kompak. Struktur yang menerima beban dan bagian bangunan yang tidak menerima beban harus dianggap sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi.
2. Gedung harus ringan. Makin berat sebuah gedung, maka makin besar daya massa jika terjadi gempa bumi. Makin tinggi gedung, harus makin



- ringan. Konstruksi atap yang berat dapat membahayakan struktur di bawah.
3. Struktur yang direncanakan harus sesederhana mungkin sehingga jalur gaya vertikal maupun horizontal dapat dimengerti dengan mudah. Struktur yang sederhana akan tahan pada kondisi gempabumi yang keras.
 4. Denah direncanakan agak simetris, berbentuk segi empat atau lingkaran.
 5. Struktur vertikal harus ditempatkan sedemikian sehingga dapat menerima beban vertikal, makin tahan terhadap gaya gempa (seismik horizontal) dan momen puntiran. Kekakuan puntir (torsion) makin tinggi jika struktur vertikal makin jauh dari pusat gedung.
 6. Tempat pencapaian vertikal (tangga, lift, shaft) sebaiknya diletakkan terpusat pada inti bangunan.
 7. Potongan vertikal pada gedung sebaiknya berbentuk segi empat. Tingkat atas yang lebih kecil atau terutama yang lebih besar akan mengakibatkan konsentrasi tegangan yang membahayakan kestabilan.
 8. Tinggi gedung sebaiknya tidak melebihi empat kali lebar gedung.
 9. Gedung bertingkat dengan lantai dasar terbuka (toko, kantor, tempat parkir dsb) dianggap sebagai lantai lunak karena kotak yang terbentuk oleh tingkat di atasnya akan jatuh pada waktu gempa bumi terjadi. Sebaiknya lantai dasar tidak terdiri dari kolom atau dinding geser saja.
 10. Struktur gedung sebaiknya dipilih monolit, berarti seluruh struktur gedung dikonstruksikan dengan bahan bangunan yang sama.
 11. Ketebalan pelat lantai dan ketinggian balok sebaiknya lebih besar daripada biasanya untuk menghindari getaran vertikal sejauh mungkin.
 12. Ringbalok horizontal pada setiap tingkat dengan batang tarik diagonal dapat meningkatkan kestabilan gedung.
 13. Fondasi juga harus sesederhana dan sekuat mungkin sehingga tidak akan patah pada saat gempabumi. Sebaiknya dipilih pelat lantai beton bertulang atau fondasi lajur dengan sloof beton bertulang.



-
14. Sangat penting manajemen bangunan dan pengawasan saat pelaksanaan yang akan menjamin kualitas bangunan.
 15. Perubahan pada suatu gedung akibat pembangunan tambahan dan perubahan harus dilakukan secara cermat karena dapat mengubah kestabilan gedung terhadap gempa bumi.

2.2. Metode Pelaksanaan Perancangan

Dua tahap yang pertama dari proses perancangan keseluruhan yaitu :

(1) Penyusunan program (analisis);

(2) Rancangan skematik (sintesis).

Penyusunan program adalah penyelusuran masalah dan perancangan adalah pemecahan masalah. Penyusunan program adalah menyelusuri dan menemukan masalah keseluruhan sehingga pemecahan perancangan dapat menyeluruh.

Dalam metode perancangan terdapat *architecture programming*. Menurut Donna P. Duerk dalam buku '*Architectural Programming*' pengertian *architecture programming* adalah *the process of managing information so that the right kind of information is available at the right stage of the design process and the best possible*.

Berdasarkan pengertian diatas maka arsitektur programing adalah rencana, prosedur, dan proses dalam memanage informasi yang dibutuhkan dalam perancangan sehingga mendapatkan informasi yang sesuai sehingga dapat digunakan dalam proses desain. Programming menghasilkan konsep bukan suatu desain.

Terdapat 2 hal penting yang dalam arsitektur programming, yaitu

1. *existing state*, sesuatu yang ada saat ini seperti peraturan, site, pengguna, iklim dan lain- lain.



2. *future state*, bagaimana kedepannya rancangan yang kita buat.

Didalam *existing state* terdapat 4 hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. *Mission*, merupakan semua tujuan dan arah dalam suatu rancangan.
2. *Goal*, kualitas yang diinginkan dalam suatu desain.
3. *Performance requirement*, merupakan level fungsi.
4. *Concept*, merupakan fisik antara element desain untuk memenuhi performance requirement.

Berikut adalah skema perancangan arsitektural programming bangunan :

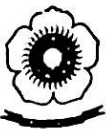
Programming

Pemrograman (programming) adalah suatu proses yang terorganisasikan dan didasarkan pada tatacara yang baku yang dapat dipergunakan pada proyek-proyek besar dan kecil, tipe bangunan yang sederhana dan rumit dan dengan klien tunggal atau banyak. Penyusunan program berguna pada proyek-proyek yang besar, rumit dan tidak terbiasa bagi kelompok-kelompok klien besar. Penyusunan program tidak sekedar mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melainkan pemrosesan data mentah menjadi informasi yang berguna dan merangsang klien untuk membuat keputusan-keputusan.

Nilai dari programming

Sasaran dari proses programming adalah menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk disain. Sebagai salah satu alat disain, bantuan program dapat memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan klien diharapkan cukup dan baik sesuai kebutuhan yang diinginkan serta memuaskan.

Untuk mengorganisasi sejumlah informasi yang akan dianalisis, seorang pemrogram harus diperlengkap dengan suatu kerangka rasional



.....

untuk memperjelas situasi dan untuk meningkatkan keteraturan. Kerangka tersebut terdiri dari suatu proses, ada lima langkah yaitu :

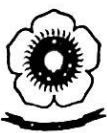
1. **Goals** (Tetapkan Sasaran) adalah tujuan akhir dan Konsep adalah alat untuk mencapai tujuan akhir
2. **Facts** (Kumpulkan dan analisis Fakta) adalah menyangkut data dan Analisis; jumlah, tapak, karakteristik pemakai.
3. **Concepts** (Ungkapkan dan uji Konsep) yaitu bagaimana mencapai goals
4. **Needs** (Tentukan Kebutuhan) Apa yang dibutuhkan (ruang, kualitas dan biaya)
5. **Problem** (Nyatakan Masalah) Kondisi apa yang penting dan menjadi acuan umum yang harus diperhatikan dalam desain

Faktor-faktor penentu perancangan berhubungan timbal balik dengan empat pertimbangan utama yaitu : **Fungsi – Bentuk – Ekonomi - Waktu**. Keempat pertimbangan yang saling berkaitan tersebut bersama dengan perangkat-perangkatnya menyediakan jaminan akan suatu pendekatan yang menyeluruh kearah perumusan masalah keseluruhan.

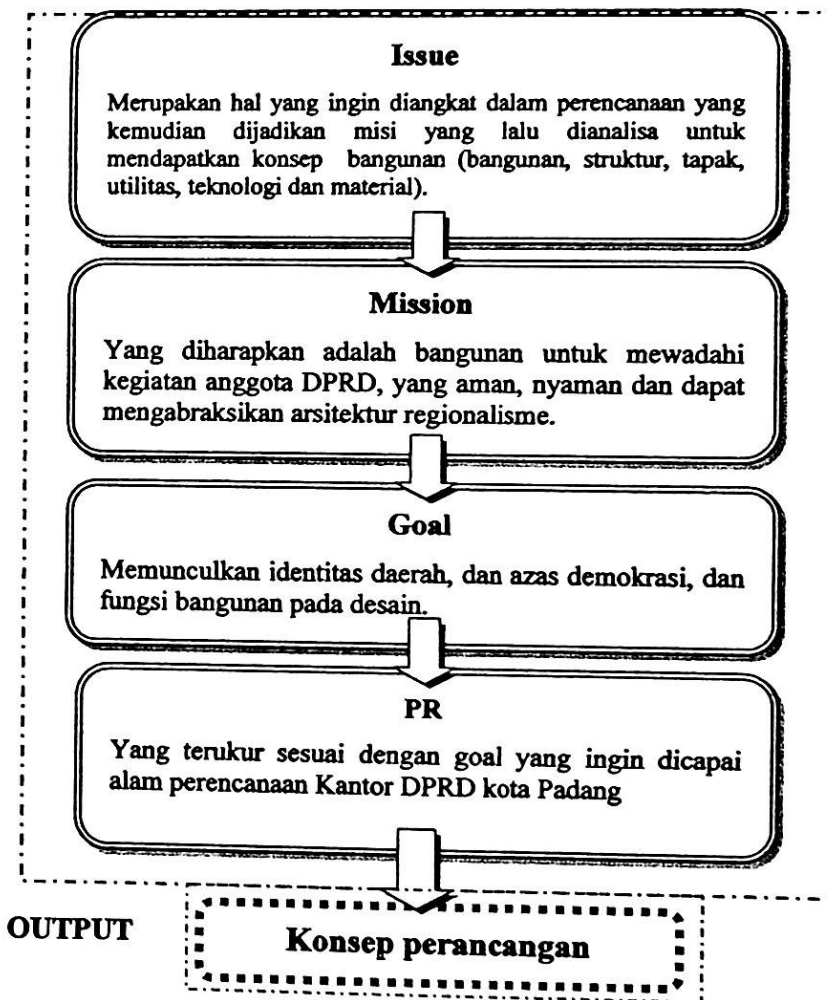
Ke lima langkah tersebut juga berkaitan secara timbal balik. Langkah-langkah tersebut dirancang bertujuan sebagai berikut :

- a. Menguji kesesuaian antara sasaran dengan konsep (yaitu apa yang harus dicapai dan bagaimana caranya).
- b. Mengenali hubungan fakta-fakta.
- c. Menganalisis kondisi-kondisi yang ada dan yang diproyeksikan.
- d. Membuktikan kelayakan proyeknya.
- e. Membentuk intisari, kejelasan dan kesinambungan suatu proyek.

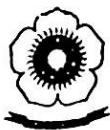
Produk terakhir dari penyusunan program (programming) adalah pernyataan permasalahan yang berguna sebagai langkah pertama pada perancangan. Pernyataan masalah haruslah jelas dan ringkas, menurut kata-



kata perancang sendiri sehingga tidak ada keraguan bahwa ia mengerti. Pernyataan masalah harus memusat pada hal-hal jelas yang sering terlewat. Pernyataan-pernyataan tersebut mendahului suatu pemecahan yang menyeluruh terhadap masalah keseluruhan bukan mengedampingkan informasi pada langkah sebelumnya tetapi dengan memecakan kembali kerumitan awal dari masalah perancangan menjadi pernyataan-pernyataan yang sederhana dan jelas.



Bagan 2.1. Metode Perancangan Gedung DPRD Kota Padang
Sumber : analisa, 2011



Adapun bentuk programing pada perancangan desain Gedung DPRD Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Goals

Perancangan gedung DPRD yang dapat memaksimalkan fungsinya sebagai tempat kerja para anggota dewan, mewujudkan citra DPRD yang demokrasi, dan mewujudkan identitas kota Padang.

2. Facts

Data yang dikumpulkan berupa struktur organisasi alat anggota DPRD dan struktur kesekretariatan DPRD kota Padang serta jumlah anggota dewan, jumlah pegawai kesekretariatan. Data-data tapak yang akan dibangun gedung DPRD kota Padang mulai data fisik dan data non fisik. Studi literatur berupa pencarian data, RTBL Kota Padang, Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD, Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Negara, arsitektur Regionalisme, standarisasi ruang dan material yang didapat dari buku dan internet.

3. Concepts

untuk dapat mewujudkan identitas kota Padang, citra DPRD maka arsitektur yang di terapkan yaitu arsitektur regionalisme.

4. Needs

Berupa analisa kebutuhan ruang, analisa tapak, analisa struktur dan analisa bangunan dan utilitas.

5. Problem

Yang harus diperhatikan kondisi lingkungan tapak, struktur tanah tapak. Bagaimana mengabstrasikan demokrsi dan identitas kota kedalam desain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Grafindo, Jakarta : 2006
- Budiardjo, Miriam. Pengantar ilmu Politik. Universitas terbuka, Jakarta, 2002
- Ching, DK, Francis, *Arsitektur : Bentuk, ruang & susunan*, penerbit Erlangga.1991.
- Duerk, Donna P. *Architectural Programming*. New York, Van Nostrand Reinhold.1993
- Gie, Liang. *Administrasi Perkantoran Modern*. 1995
- Neufert, Ernest. *Data Arsitek Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Nuraida, Ida. Managemen Administrasi Perkantoran. Kanisius, Yokyakarta : 2008
- Poerbo, Hartono. *Utilitas Bangunan*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998
- Panero, Julius, dan Zelnik, Martin, 2003. *Dimensi Manusia dan Ruang Interior*, Jakarta : Erlangga
- Schodek, Daniel I. *Struktur*. Penerbit Erlangggga, Jakarta. 1999
- Soeroto, Myrtha. Dari Arsitektur Tradisional Menuju Arsitektur Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta : 2003
- Zulkarnaini. Budaya Alam Minangkabau. Usaha Iklas, Bukittinggi : 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 19 tentang pedoman penyusunan tata tertip DPRD. Tamita Utama, Jakarta, 2010
- Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, 2007



Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 45/PRT/M/2007
tanggal 27 Desember 2007 tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.*

SNI 03-1726, 2002. *Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan
gedung.* Jakarta

Standart Toilet Indonesia

I-Arch, *Harmoni With Nature*, 2006

http://sekwan.palembang.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=46

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kota>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_%28wilayah_administratif%29

<http://journal.um.ac.id/index.php/teknologi-kejuruan/article/view/394>

<http://bundokanduang.wordpress.com>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1274/1/arsitek-vinky3.pdf>

http://wiki.uui.ac.id/images/2/25/Sejarah_%2B_Teori_Resume.pdf

<http://www.padang.go.id/v2/content/view/2359/232/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_perwakilan_rakyat_daerah